



BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI SETIABUDI NOMOR 1 TEMANGGUNG
Telepon (0293) 491048 Faximili (0293) 491313
Email : Kesbangpoltemanggung672@gmail.com



HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP., M.M.
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator



FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST
NIP. 197909242003122006

Mengetahui,



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203241992031000

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terutama apabila dilakukan review atas Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 5 Juni 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DJOKO PRASETYO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	11
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- c. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
- e. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan paskibra
- f. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan kaukus perempuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian s.d. TW I Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d TW I 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Indeks Toleransi	Angka	4,51	4,5	99,78	Sangat Tinggi
2	Menurunnya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	90	78,29	100	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	Persen	90	30	33,33	Sangat Rendah
5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	Persen	16,67	20,98	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	0	0	Sangat Rendah
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : IKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pada kinerja IKUPD dan indikator program Badan Kesatuan Bangsa sampai dengan Triwulan I masih ada 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah karena perencanaan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV di Tahun 2025. Dengan belum tercapainya kinerja implikasi yang timbul adalah capaian kinerja tergantung pada jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan pelaksanaan pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat baru bisa dilaksanakan menunggu jadwal yang telah direncanakan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan :

1. Melaksanakan suatu kegiatan dengan mendompleng kegiatan lain (sharing kegiatan).
2. Mengevaluasi jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Kegiatan pada Triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.679.911.220	8.381.656.385	-				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.717.315.885	4.467.315.885	56.971.836	100%	20%	20%	Sangat rendah
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.140.885	4.062.140.885	-				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885	4.062.140.885	-	14	3	25%	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-				
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		-	-				
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.675.000	127.675.000	-				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	5.000.000	270.000	10	2	20%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.675.000	31.675.000	-				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	18.000.000	-	12	3	25%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	10.000.000	-	12	3	25%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	18.000.000	1.500.950	12	3	25%	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	45.000.000	7.572.5000	12	3	25%	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000	215.000.000	-				
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	30,910,400	30,910,400	3.869.250	12	3	25%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000	6,000,000	730.000	12	3	25%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178,089,600	178,089,600	38.035.436	12	3	25%	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000	62.500.000	-				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	40.000.000	40.000.000	4.783.500	12	3	25%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	15,000,000	72.500	12	3	25%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	7.500.000	137.700	12	3	25%	
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	700.000.000	425.000.000	4.129.500	90%	78.29%	100%	Sangat Tinggi
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.000.000	425.000.000					
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000	-					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	625.000.000	425.000.000	4.129.500	350	323	92,28	
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.528.595.335	2.606.855.000	1.956.000	90	30	33.3333	Sangat Rendah
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.528.595.335	2.606.855.000					

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.528.595.335	2.606.855.000	1.956.000	12	3	25%	
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20.000.000	-	-	16.67	20.98		Sangat Tinggi
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000						
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000	-	-				
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	135.000.000	100.000.000	-	100	0	0	Sangat Rendah
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	135.000.000	100.000.000					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	135.000.000	100.000.000	-	120	30	25%	
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	579.000.000	782.485.500	84.325.000	100	100	100	Sangat Tinggi
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	579.000.000	782.485.500					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	574.000.000	510.000.000	84.325.000	200	50	25%	

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganganan Konflik di Daerah	5.000.000	272,485,500	-	72	7	9,7%	
--	-----------	-------------	---	----	---	------	--

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah pada Triwulan I pelaksanaan kegiatan masih menunggu penyesuaian efisiensi anggaran sehingga menghambat pencapaian kinerja.

Dengan belum tercapainya capaian kegiatan implikasi yang timbul adalah progres pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat

Upaya yang dilakukan untuk mencapai taget kinerja dengan :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi target kinerja secara berkala
2. Mengkaji ulang perencanaan target kinerja

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Renja tahun 2025

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	
	BELANJA DAERAH	7.679.911.220	7.170.628.840	7.420.106.160	(259.805.060)	249.477.320	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.717.315.885	3.279.505.860	3.279.505.860	(1.437.810.025)	0	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.140.885	2.943.682.910	2.943.682.910	(1.118.457.975)	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885	2.943.682.910	2.943.682.910	(1.118.457.975)	0	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000			(250.000.000)	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000			(250.000.000)	0	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.675.000	61.215.540	65.294.900	(71.380.100)	4.079.450	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	3.500.000	2.500.000	(7.500.000)	(1.000.000)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.675.000		0	(31.675.000)	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	11.057.950	12.742.400	(7.257.600)	1.684.450	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	6.960.000.	6.400.000	(5.600.000)	(560.000)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	17.215.000	14.510.000	(3.490.000)	(2.705.000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	22.482.500	29.142.500	(15.857.500)	6.660.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000	215.000.000	205.320.550	(9.679.450)	(9.679.450)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400	30.910.400	21.230.950	(9.679.450)	(9.679.450)	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.089.600	178.089.600	178.089.600	0	0	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000	59.607.500	65.207.500	11.707.500	5.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	37.492.500	43.092.500,00	3.092.500	5.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	15.000.000	15.000.000,00	9.000.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	7.115.000	7.115.000,00	(385.000)	0	
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	700.000.000	425.000.000	505.000.000	(195.000.000)	89.477.320	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.000.000	425.000.000	505.000.000	(195.000.000)	89.477.320	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000	0	0	(75.000.000)	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	625.000.000	425.000.000	505.000.000	(120.000.000)	89.477.320	
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.528.595.335	2.603.897.600	2.603.897.600	(1.075.302.265)	0	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.528.595.335	2.603.897.600	2.603.897.600	(1.075.302.265)	0	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.528.595.335	2.603.897.600	2.603.897.600	1.075.302.265	0	
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20.000.000	0	160.000.000	140.000.000	160.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20.000.000	0	160.000.000	140.000.000	160.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000	0	160.000.000	140.000.000	160.000.000	
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	135.000.000	90.000.000	90.000.000	(45.000.000)	0	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	135.000.000	90.000.000	90.000.000	(45.000.000)	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	135.000.000	90.000.000	90.000.000	(45.000.000)	0	

F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	579.000.000	781.702.700	781.702.700	202.702.700	0	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	579.000.000	781.702.700	781.702.700	202.702.700	0	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	574.000.000	509.217.200	509.217.200	(64.782.800,00)	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.000.000	272.485.500	272.485.500	267.485.500,00	0	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Dari tabel di atas berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 7.679.911.220,00
2. Pagu Awal APBD (perubahan perbup II) : Rp 7.170.628.840,00
3. Pagu Perubahan : Rp 7.420.106.160,00
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja: Rp 259.805.060,00
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD: Rp 249.477.320,00

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Pengurangan anggaran Gaji ASN
3. Pergeseran anggaran DBHCHT ke Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah
4. Efisiensi anggaran sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lain.

5. Penambahan anggaran pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6. Penambahan anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
7. Efisiensi anggaran pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8. Efisiensi anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
9. Efisiensi anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

3. Efisiensi anggaran sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lain.
4. Penambahan anggaran pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5. Penambahan anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Efisiensi anggaran pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
7. Efisiensi anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

8. Efisiensi anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

3.2 Matriks Rencana Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								7.679.911.220,00	8.381.656.385,00	7.420.106.160,00	-259.805.060,00						9.544.778.885,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							7.679.911.220,00	8.381.656.385,00	7.420.106.160,00	-259.805.060,00							9.544.778.885,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							7.679.911.220,00	8.381.656.385,00	7.420.106.160,00	-259.805.060,00							9.544.778.885,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pengelolaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang				100 %	100 %	4.717.315.885,00	4.467.315.885,00	3.279.505.860,00								4.737.315.885,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase ketersediaan administrasi				100 %	100 %	4.062.140.885,00	4.062.140.885,00	2.943.682.910,00	-1.118.457.975,00			-	3. reformasi birokrasi	Terlaksananya Administrasi		4.062.140.885,00	BADAN KESATUAN
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.062.140.885,00	4.062.140.885,00	2.943.682.910,00	-1.118.457.975,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			4.062.140.885,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	136.675.000,00	127.675.000,00	65.294.900,00	-71.380.100,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		146.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.675.000,00	31.675.000,00	0,00	-31.675.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			31.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	18.000.000,00	12.742.400,00	-7.257.600,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	10.000.000,00	6.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	14.510.000,00		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	29.142.500,00	-15.857.500,00	Kab. Temang ung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkata n sarana dan prasarana pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang kegiatan perangkat daerah</i>				100 %	100 %	215.000.000,00	215.000.000,00	205.320.550,00				-	3. reformasi birokrasi melalui peningkata n sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksan any Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah		215.000.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	30.910.400,00	30.910.400,00	21.230.950,00		Kab. Temang ung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkata n sarana dan prasarana pelayanan publik			30.910.400,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Temang ung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkata n sarana dan prasarana pelayanan publik			6.000.000,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	178.089.600,00	178.089.600,00	178.089.600,00	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			178.089.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	53.500.000,00	62.500.000,00	65.207.500,00				-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		63.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	14 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	43.092.500,00		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.115.000,00		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter				80 %	80 %	700.000.000,00	425.000.000,00	505.000.000,00	325.000.000,00							1.025.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	425.000.000,00	505.000.000,00	-195.000.000,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila dan berkarakter kebangsaan		1.025.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang				53 Orang	53 Orang	625.000.000,00	425.000.000,00	505.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA NETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan politik				80 %	80 %	1.528.595.335,00	2.606.855.000,00	2.603.897.600,00	1.056.382.165,00							2.584.977.500,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi				1 kegiatan	1 kegiatan	1.528.595.335,00	2.606.855.000,00	2.603.897.600,00	1.075.302.265,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningka tunya partisipas i masyarak at dalam politik		2.584.977.500,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01. 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				2 Dokume n	2 Doku men	1.528.595.335,00	2.606.855.000,00	2.603.897.600,00	1.075.302.265,00	Kab. Temangg ung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkata n sarana dan prasarana pelayanan publik			2.584.977.500,00	BADAN KESATU AN BANGSA DAN POLITIK

4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan				13,33 %	13,33 %	20.000.000,00	0,00	160.000.000,00								75.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	0,00	160.000.000,00	140.000.000,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya organisasi masyarakat yang berdaya		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	160.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 %	100 %	135.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	115.000.000,00							250.000.000,00	

	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat				1 kegiatan	1 kegiatan	135.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	-45.000.000,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 orang	120 orang	135.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah				100 %	100 %	579.000.000,00	782.485.500,00	781.702.700,00	293.485.500,00							872.485.500,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 kegiatan	2 kegiatan	579.000.000,00	782.485.500,00	781.702.700,00	202.702.700,00			-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kondusifitas wilayah		872.485.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar				200 Orang	200 Orang	574.000.000,00	510.000.000,00	509.217.200,00	-64.782.800,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Laporan	72 Laporan	5.000.000,00	272.485.500,00	272.485.500,00	267.485.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			272.485.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								7.679.911.220,00	8.381.656.385,00	7.420.106.160,00	12.011.693.847,64						9.544.778.885,00		

Sumber : SIPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, terdiri dari 5 Program 9 Kegiatan dan 17 sub kegiatan yang sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 7.420.106.160,00. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 5 Juni 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG


DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002